

PERAN SOSIAL MEDIA DAN BUDAYA POLITIK GENERASI MILENIAL DALAM PEMILU

¹Marzuki Manurung, ²Dinda aurellia, ³Nadra Husna Harahap, ⁴Rizki Fadilah Nst
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹Marzukimanurung07@gmail.com, ²dindaarellia07@gmail.com ,
³nadrasahna123@gmail.com , ⁴rizkifadilahnst2@gmail.com

Received: 02 Desember 2023 | Accepted: 01 Januari 2024 | Published: 24 Maret 2024
DOI : 10.31602/jt.v6i1.13300

ABSTRAK

Media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat khususnya generasi milineal. Pemilu adalah salah satu moment politik dimana media sosial khususnya facebook dan whatsapp untuk kepentingan politik. Budaya politik adalah corak perilaku dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa, pemerintahan nasional, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat dan norma, dan merupakan budaya yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat setiap hari. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai sistem nilai bersama sosial, yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan perumusan kebijakan publik dari seluruh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Budaya politik dan corak perilaku dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa, pemerintahan nasional, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat dan norma, dan merupakan budaya yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat setiap hari tentang fenomena penggunaan media sosial berbasis internet sebagai instrumen dalam komunikasi politik dalam kontestasi pemilukada Jawa Barat tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, yakni peneliti menganalisis literatur tertulis sebagai sumber utama. Oleh karena itu Media sosial merupakan saluran komunikasi para aktor politik untuk berkomunikasi dengan pendukung dan pemilih. Bentuk komunikasinya adalah membangun opini publik sekaligus menggalang banyak dukungan politik.

Kata Kunci: Sosial medial, budaya, politik.

ABSTRACT

Social media has become an important part of people's lives, especially the millennial generation. Elections are one of the political moments where social media, especially Facebook and WhatsApp, are for political purposes. Political culture is a pattern of behavior in society in national life, national government, government politics, laws, customs and norms, and is a culture that must be obeyed by all members of society every day. Political culture can also be interpreted as a system of shared social values, which has the awareness to participate in collective decision making and the formulation of public policies throughout society. The purpose of this research is to find out political culture and patterns of behavior in society in national life, national government, government politics, law, customs and norms, and is a culture that must be obeyed by all members of society every day regarding the phenomenon of internet-based social media use. as an instrument in political communication in the 2018 West Java regional election contestation. This research uses library research methods, namely researchers analyze



written literature as the main source. Therefore, social media is a communication channel for political actors to communicate with supporters and voters. The form of communication is to build public opinion while gathering a lot of political support.

Keywords: *Social media, culture, politics.*

PENDAHULUAN

Internet dan media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya bagi warga kelas ekonomi menengah ke atas dan para generasi muda yang dikategorikan sebagai generasi milenial. Massifnya penggunaan internet dan juga media sosial berbasis internet serta merta telah menggeser peran media-media konvensional atau wadah-wadah sosial yang selama ini masih memiliki peran pokok dalam menyebarkan beragam informasi termasuk pengetahuan bagi warga. Media massa berbasis cetak atau elektronik seperti koran, majalah, radio atau televisi semakin ditinggalkan oleh warga karena beberapa alasan di antaranya media cetak tidak efisien lagi dari segi harga demikian halnya dengan kontennya yang tidak selalu update seperti layaknya media berbasis online.¹

Media sosial berkembang pesat sejalan dengan pertumbuhan dan kemudahan akses informasi yang didukung oleh kekuatan teknologi komunikasi. Media sosial memiliki pengguna aktif sebesar 200 juta. Indonesia merupakan salah satu negara teraktif di media social. Pola penyebaran pesan yang cenderung bebas memiliki maksud agar segera diketahui publik menjadi tujuan dari para pengguna media sosial, maka tidak menjadi persoalan apakah informasi yang disebarkan itu akurat sesuai prinsip pemberitaan yang baik dan benar. Kecepatan pesan tanpa sumber yang dapat dipercaya dan sesuai fakta cenderung berdampak buruk terhadap dinamika kehidupan politik bernegara.²Media sosial di Indonesia memiliki kecenderungan pemberitaan politik melalui akun individu, kelompok, maupun pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber informasi yang layak. Masyarakat penerima pesan juga tidak menghiraukan tentang keakuratan maupun keabsahan informasi, yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan informasi sepihak sesuai dengan kepentingan.

Kehidupan politik di Indonesia rentan terhadap konflik antar kelompok politik yang dikarenakan berlimpahnya pesan, pemberitaan dan informasi yang bermuatan saling mengkritik, prasangka berlebihan, subyektivisme, sikap sektarianisme, komunalisme dan semangat sub nasional. Memang tidak semua orang menilai positif tentang media sosial sebagai sumber informasi, karena itu penting untuk mempertimbangkan kritik dan kelemahannya. Penggunaan media sosial yang semakin kuat ini meminggirkan media massa mainstream dalam persaingan penyebaran informasi yang berhubungan dengan politik dan kekuasaan

¹ Ahmad Sahida, *Sekali lagi tentang hoax*, (Yogyakarta:Majalah Tempo,2015), hal, 62.

² Bakti, Iriana, Evie Novianti dan H.R.Budiana, “*PERAN JEJARING KOUNIKASI DALAM MEMBANGUN KOHESIVITAS KELOMPOK*”, Jurnal IZUMI, Vol.1 No.3, (2015).



negara. Kekuatan dan popularitas media sosial, partai politik, institusi politik, kelompok-kelompok politik, dan berbagai entitas di masyarakat yang bersentuhan dengan pemerintah dan kekuasaan negara, berupaya memanfaatkan media sosial sebagai pendukung kekuatan untuk mempengaruhi khalayak.³ Masyarakat lebih percaya terhadap media sosial meskipun menyadari bahwa akurasi tidak terjamin. Dalam situasi persaingan politik antar kelompok yang memanas, masyarakat lebih menyukai pesan media sosial yang bermuatan kritik dan tuduhan negatif terhadap kelompok politik yang tidak sejalan.

PEMBAHASAN

A. Budaya Politik

Budaya merupakan salah satu variabel penting dalam sistem politik. Konsep suatu sistem politik harus memperhatikan variabel budaya didalamnya agar sistem tersebut sesuai dan mampu menggambarkan nilai-nilai dasar dan karakteristik masyarakat wilayah tersebut. Budaya memainkan perannya dalam membentuk perilaku kolektif sebuah komunitas politik. Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai dasar dan karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga masyarakat juga memiliki budaya politik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara bersumber dari akar budaya politik yang merupakan wujud sintesa Budaya politik merupakan aspek yang sangat penting dari sistem politik. Hal ini disebabkan oleh struktur dan fungsi fungsinya Politik dalam System politik sangat bergantung pada budaya politik di sekitarnya.⁴ Dalam konteks sistem politik Indonesia, budaya politik diposisikan sebagai salah satu dari sekian banyak jenis lingkungan, Mempengaruhi dan menekan sistem politik, bahkan yang dianggap sebagai sistem politik yang paling intens dan mendasar.

Budaya politik merupakan kontraksi salah satu elemen pembangunan politik Indonesia, yaitu mencapai keseimbangan atau harmoni antara budaya politik dengan sistem politik yang ada atau yang akan datang. Orang tidak terlepas dari pembicaraan tentang politik. Figur didefinisikan sebagai angka yang relevan atau penting. Politisi adalah individu yang berbakat dan dewasa yang akan membimbing warganya untuk menjadi lebih maju dan mandiri.⁵ Figur tersebut terkait dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Media sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi massa di era media baru atau disebut juga media baru. Media Baru adalah media massa yang berbasis internet atau lebih dikenal dengan media online. Media internet Itu

³ Eko Harry, “*MEDIA SOSIAL PENDUKUNG JARINGAN KOMUNIKASI POLITIK*”, Jurnal ASPIKOM, Vol.3 No. 3,(2017).

⁴ Budi Irawan, *Dasar-dasar administrasi publik*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), hal,34.

⁵ Smith, D. Ronald, *Strategic Planning For Public Relations. Second Edition. Lawrence Erlbaum Associates Publisher. London* (2015)



menjadi salah satu bentuk komunikasi massa dan direkam pada awal 1996.⁶ Media sosial sangat penting sebagai sarana proses komunikasi politik yang efektif, terutama dalam kampanye pemilu yang dapat menjadi perantara antara tokoh politik dengan pemilihnya. peristiwa-peristiwa sejarah yang telah mengkristal dalam kehidupan masyarakat dan diwariskan turun temurun berupa tatanan nilai dan norma perilaku. Di Indonesia, nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai dasar yang meskipun berbeda-beda namun tidak bertentangan satu sama lain. Nilai itu berasal dari nilai-nilai masyarakat-masyarakat adat yang ada di seluruh Negara Indonesia yang kemudian dirangkum dan disatukan dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian akar budaya tersebut secara keseluruhan dapat dilihat dalam Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang memiliki makna mendalam.

Prinsip-prinsip (nilai) dasar dalam Pancasila adalah prinsip Ketuhanan yang menjadi elemen paling utama dari elemen negara hukum Indonesia, prinsip musyawarah, keadilan sosial serta hukum yang tunduk pada kepentingan nasional dan persatuan Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, prinsip keadilan sosial, dan prinsip terakhir negara hukum Indonesia adalah elemen dimana hukum mengabdikan pada kepentingan Indonesia yang satu dan berdaulat yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Pengertian partai politik secara etimologis menurut Jimly Assidique berasal dari kata partai yang berarti bagian atau golongan.⁷ Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, atau bahkan kepentingan. Pengelompokan itu berbentuk organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak di asosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.⁸

Menurut Miriam Budiardjo “Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum”. Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

⁶ Soleh Sumirat, Dasar-dasar public Relation, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).

⁷ Almond, Gabriel A. & Verba, Sidney (1984). Budaya Politik: Tingkahlaku Politik dan Demokrasi di Lima Negara (terjemahan). Jakarta: Bina Aksara.

⁸ Ardial (2010). Komunikasi Politik. Jakarta: Indeks



memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi partai politik berdasarkan pengertian di atas, budaya politik adalah perilaku masyarakat dalam kehidupan politik sehari-hari berdasarkan nilai dan norma yang berlaku secara sosial. Kantaprawira mengemukakan sudut pandang lain “Budaya politik adalah persepsi manusia, dan sikapnya terhadap berbagai isu politik dan peristiwa politik juga termasuk dalam struktur kegiatan politik. Budaya politik yang sempit ditandai dengan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Hal ini disebabkan oleh faktor kognitif, seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, anggota masyarakat yang tertarik dengan topik budaya politik, memperhatikan, dan mungkin memiliki kesadaran terhadap keseluruhan sistem (terutama keluarannya), tetapi memperhatikan aspek tersebut. adalah masukan peserta politik Dan kesadaran bisa dikatakan nol, dan budaya politik peserta Ciri dari (participant political culture) adalah seseorang menganggap dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, sehingga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, serta dapat mencapai perdamaian. Gunakan hak dan tanggung kewajiban, namun dalam suatu masyarakat sering dijumpai salah satu jenis budaya politik, misalnya dalam budaya politik partisipan masih dapat ditemukan individu-individu yang tidak berkepentingan dengan tujuan politik yang luas. Sadar akan realitas budaya politik yang hidup dalam masyarakat tersebut.⁹

Budaya politik memiliki beberapa type. Berikut ini dipaparkan beberapa type budaya politik. Budaya politik yang sempit ditandai dengan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Hal ini disebabkan oleh faktor kognitif, seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, anggota masyarakat yang tertarik dengan topik budaya politik, memperhatikan, dan mungkin memiliki kesadaran terhadap keseluruhan sistem (terutama keluarannya), tetapi memperhatikan aspek tersebut. adalah masukan peserta politik Dan kesadaran bisa dikatakan nol, dan budaya politik peserta Ciri dari (participant political culture) adalah seseorang menganggap dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, sehingga menyadari hak dan kewajibannya (kewajiban) masing-masing, serta dapat mencapai perdamaian.¹⁰ Gunakan hak dan tanggung kewajiban.

Namun dalam suatu masyarakat sering dijumpai salah satu jenis budaya politik, misalnya dalam budaya politik partisipan masih dapat ditemukan individu-individu yang tidak berkepentingan dengan tujuan politik yang luas. Sadar akan realitas budaya politik yang hidup dalam masyarakat tersebut, Almond menyimpulkan bahwa terdapat budaya politik campuran. Menurutnya, budaya ini biasa terjadi pada masyarakat yang terus mengalami perkembangan pesat dan perubahan dinamis. Sistem dapat diubah, dan struktur budaya dan politik selalu tidak sesuai. Budaya politik politik yang sempit merupakan budaya politik dengan

⁹BPS (Badan Pusat Statistika) (2017). Jawa Barat dalam Angka, Bandung: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat.

¹⁰Cangara, Hafied (2016). Komunikasi Politik, Teori dan Strategi, Depok: Rajawali Press.



derajat partisipasi politik yang sangat rendah. Jika frekuensi orientasi keempat dimensi penentu budaya politik suatu masyarakat mendekati nol atau sama sekali tidak memperhatikan keempat dimensi tersebut, maka dapat dikatakan sempit och. Budaya politik ini biasanya ditemukan pada masyarakat suku Afrika atau pedesaan di Indonesia. Dalam masyarakat ini, tidak ada peran politik yang spesifik. Kepala suku, kepala desa, orang Kiai atau Dukun, biasanya menguraikan semua peran yang ada, apakah itu politik, ekonomi, atau agama.

Budaya politik subjek (subject), yaitu budaya politik masyarakat yang relatif maju secara sosial dan ekonomi tetapi masih bersifat pasif. Jika masyarakat pada umumnya memiliki kecenderungan tinggi terhadap tujuan pengetahuan dan keluaran sistem politik, atau memiliki pemahaman tertentu terhadap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, maka dapat dikatakan budaya politik masyarakat adalah sebuah tema. Namun yang diperhatikan sebenarnya bukanlah frekuensi orientasi pemerintah dalam struktur dan peran proses pengambilan keputusan. Subjek mengetahui otoritas pemerintah dan secara efektif menunjukkannya pada otoritas itu. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada diekspresikan melalui rasa bangga atau bahkan jijik. Intinya, dalam budaya politik subjek, terdapat pemahaman yang cukup tentang sistem politik secara umum dan proses pengambilan kebijakan pemerintah.¹¹

Budaya politik tidak terlepas dari kesadaran politik. Kesadaran politik adalah berbagai bentuk pengetahuan, arah dan nilai yang membentuk opini politik pribadi sesuai dengan hubungan antara individu dan kekuasaan politik. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sipil. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga negara memiliki kepedulian terhadap status nasional atau masalah pembangunan.¹² Kesadaran politik merupakan proses internal yang menunjukkan bahwa setiap warga negara sadar akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kesadaran politik atau keyakinan hidup berbangsa bersifat komprehensif dan kompleks, sehingga tanpa dukungan aktif dari seluruh warga masyarakat, banyak tugas kebangsaan yang terabaikan.

MEDIA SOSIAL

Media sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi massa di era media baru atau disebut juga media baru. New Media adalah media massa yang berbasis internet, atau lebih umum lagi media online. Media internet Ini kemudian menjadi salah satu bentuk alat komunikasi massa dan direkam pada awal tahun 1996. Pada masa lalu, alat komunikasi massa dalam paradigma lama lebih banyak ditujukan pada media tradisional, seperti televisi, koran, majalah, tabloid, buku, radio, film, dan kaset (CD).

¹¹Cohen, Michael (2016). "Top Political Hashtags of 2016" Berita 19 September 2016. Diakses 7 Oktober 2018

¹²Fadil, Muhammad (2007). Konflik Daerah sebagai Budaya Politik Masyarakat. Jurnal Madani, II (2007), 21-27.



Sedangkan dalam paradigma baru alat komunikasi massa adalah surat kabar, televisi, radio, majalah dan internet. Mengapa media sosial termasuk dalam komunikasi massa? Jelas, fondasi media sosial adalah perkembangan media internet. Dilihat dari pengertiannya, komunikasi massa merupakan proses membangun makna bersama antara media massa dan medianya. Audiens dan media massa merupakan alat atau media atau saluran untuk menyampaikan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa media social merupakan salah satu media massa dan sumber informasi yang dapat diakses oleh banyak orang.

Media sosial tidak terlepas dari perkembangan internet, di internet media massa berbasis web merupakan salah satu sumber informasi dan telah banyak digunakan oleh masyarakat. Pada dasarnya, media sosial adalah perkembangan terbaru dari teknologi pengembangan web berbasis Internet baru, yang memudahkan untuk berkomunikasi, berpartisipasi, dan berbagi untuk membentuk jaringan online, sehingga memungkinkan mereka untuk menyebarkan konten mereka sendiri. Selain itu, menurut (Zarella 2010: 51), media jejaring sosial adalah situs tempat orang berkomunikasi dengan teman di dunia nyata dan dunia maya. Saat ini, kebanyakan orang lebih cenderung menjadi lawan komunikasi jarak jauh daripada media sosial. Hal ini tentunya sangat mudah, terutama untuk efisiensi waktu dan praktek semua soal.¹³

Media sosial memiliki fungsi user-generated content (UGC) yang dihasilkan oleh pengguna bahkan editor seperti organisasi media massa. Selain itu, pengguna akan dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat pesan. Ada beberapa situs media sosial yang populer saat ini, antara lain: Instagram, Twitter, Facebook, Line, Whatsapp, BBM, dll.¹⁴ Booming media sosial di Indonesia dimulai dengan meluasnya penggunaan internet di Indonesia pada tahun 1996, dan masyarakat mulai mencari ilmu dan informasi melalui media internet. Dengan berkembangnya era layanan media massa di internet juga banyak terdapat berbagai layanan, salah satunya adalah keberadaan media sosial. Faktor lain yang mempengaruhi pesatnya penggunaan media sosial adalah keberadaan Android atau ponsel pintar, di mana ponsel biasa tanpa fungsi Playstore tidak dapat mengunduh berbagai aplikasi media sosial. Penggunaan internet semakin meningkat, sehingga penyediaan ponsel berbasis internet juga semakin meningkat sehingga semakin nyaman dan praktis.

SOSIAL MEDIA DAN BUDAYA POLITIK

Fungsi sosial media berubah dari waktu ke waktu, sehingga tidak selalu dinamis dan mengikuti kebutuhan zaman dan pengguna (misalnya komunitas atau penggunanya sendiri). Awalnya, media sosial dirancang untuk bertukar informasi dan berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Namun saat ini tidak hanya sedikit media sosial yang mengimplementasikan fitur tersebut, yang semula merupakan sarana bertukar informasi dengan teman dekat, namun saat ini batasan atau

¹³ Gatara, Said AA & Said, Moh. Dzulkiah (2007). Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian. Bandung: Pustaka Setia.

¹⁴Gazali, Effendi (2004). Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu, 8 (I) Volume 8, 53 –74.



batasan tidak lagi menjadi masalah. Misalnya pengguna media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram memiliki pengikut atau orang dengan jumlah pengikut yang banyak. Meskipun Facebook dan beberapa teman media sosial atau pengikut akun lainnya tidak memiliki kebijakan lebih dari 100 orang, hal itu saat ini kurang karena kebutuhan dan minat yang lebih banyak.¹⁵ Artinya tidak lagi semata-mata sebagai media penyedia informasi namun ada kepentingan lain yaitu bisnis, politik dan lain-lain yang ada pada media sosial.

saat ini hanya sedikit orang awam yang berusaha meningkatkan followersnya dengan berbagai cara, sehingga menjadi pusat perhatian dan memiliki banyak penggemar. Di antara sekian banyak media sosial, Instagram memang menjadi media sosial yang paling banyak digunakan untuk bisnis dan intranet, juga muncul di Instagram. Sejak saat itulah muncul istilah baru untuk fenomena ini yaitu selebritis atau selebritis Instagram yang mengira dirinya artis. atau Artis yang saat ini sedang populer atau terkenal di media televisi, koran atau majalah, tetapi terkenal dengan menampilkan foto, video atau program yang menarik.

Bidang politik adalah fenomena lain, dengan maraknya gerakan politik dan diskusi di bidang politik muncul di media sosial. Sejak pemilihan presiden 2014, gerakan politik dan debat politik telah terlihat di Instagram, Twitter, dan Facebook. Banyak akun yang sengaja memberikan konten yang berisi kampanye politik dan informasi politik yang lebih mendalam. Terakhir, ada kata “buzzer” di media sosial. “Buzzer” berasal dari bahasa Inggris yang artinya ringtone atau alarm. Sejauh menyangkut buzzer, ini didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk mengeluarkan pesan atau mengumumkan sesuatu untuk mengumpulkan orang. Dalam konteks media sosial, buzzer akan berfungsi semaksimal mungkin dan mempublikasikan postingan tertentu, tujuannya agar public cepat memahaminya, atau sebagai promosi produk biasanya buzzer, karena akan menimbulkan beberapa masalah. media sosial.

Media sosial merupakan saluran komunikasi para aktor politik untuk berkomunikasi dengan pendukung dan pemilih. Bentuk komunikasinya adalah membangun opini publik sekaligus menggalang banyak dukungan politik. Penggunaan media sosial juga meningkatkan jaringan komunikasi politik, hubungan politik, dan partisipasi publik dalam pemilu. Media sosial lebih jauh menggambarkannya sebagai menemukan sarana dan basis informasi yang ideal bagi publik tentang kebijakan dan posisi politik, serta membangun dukungan komunitas untuk para politisi yang berkampanye. Banyak penelitian di seluruh dunia menggunakan media sosial untuk menjalin hubungan dengan pemilih dan membentuk diskusi politik dalam dialog langsung dengan publik, menciptakan ruang dialog antara politisi dan publik, serta menarik pemilih/ pemilih muda. Lebih penting bagi politisi.

¹⁵ Kantaprawira, Rusadi (1985). Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru.



MEDIA SOSIAL SEBAGAI PLATFORM PILIHAN UNTUK KOMUNIKASI POLITIK

Perhelatan politik melalui Pemilu Jawa Barat pada dasarnya tidak lepas dari pertarungan politik secara nasional. Hal itu didasari pada fakta bahwa, Jawa Barat merupakan lumbung suara terbesar dalam pertarungan politik nasional khususnya pada Pemilu Presiden. Dengan persentasi penduduk 18% dari total jumlah penduduk nasional menjadikan Jawa Barat menjadi lahan pertarungan politik yang sengit sejak pemilihan langsung diperkenalkan. Kedua, Jawa Barat berdasarkan hasil Pemilihan Presiden Tahun 2014 menempatkan kelompok oposisi sebagai pemenang kontestasi sehingga kubu oposisi nasional ingin mempertahankan posisi itu dan pada sisi yang lain kubu petahana ingin merebut suara mayoritas di daerah ini untuk mengamankan posisi sebagai pemenang pada kontestasi Politik tahun 2019. Konteks pemilu Jawa Barat melalui komunikasi politik lewat media sosial ini selanjutnya dianggap sebagian kontestan sebagai satu langkah dalam mewarnai perubahan sistem politik secara nasional ke depan melalui pergantian pimpinan nasional jika salah satu pasangan calon bisa memenangkan kontestasi. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi pendapat yang menyatakan bahwa “political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for the political system”. Pendapat yang lain menganggap bahwa komunikasi politik tersebut tidak terlepas dari perlunya strategi yang merupakan keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan.¹⁶

Pada pemilu Jawa Barat Tahun 2018 para kandidat dan juga relawan yang terafiliasi dengan pasang calon kepala daerah, semuanya menggunakan media sosial facebook maupun whatsapp dalam melakukan kampanye politiknya. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, pasangan nomor urut 1 (Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum) misalnya menggunakan akun facebook dengan nama Relawan Jabar Juara. Pasangan nomor urut 2 (Hasanuddin dan Anton Charliyan) melalui akun facebook Relawan Hasanah. Pasangan nomor urut 3 (Sudrajat dan Ahmad Syaikhu) dengan akun facebook Pendukung Sudaradjat Syaiku-Asyik dan Pasangan nomor urut 4 (Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi) dengan akun facebook Dukung 2 DM P4T GULIP4T. Konten yang ada pada akun media sosial facebook di atas memuat tentang visi-misi para pasangan calon, program, profil maupun kegiatan harian yang dilakukan para pasangan calon pada masa kampanye maupun di luar masa kampanye. Terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu, konten yang disajikan juga memuat informasi tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilu dan rekrutmen tenaga penyelenggara pemilu. Selain itu, konten akun tersebut juga memuat peraturan dan teknis pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi pemilu.¹⁷ Namun, sebagai bagian dari kampanye politik, konten yang umum dan dominan yang ditampilkan

¹⁶Kompas (2014) “Ini Hasil Rekapitulasi Pemilu Presiden di 33 Propinsi” Berita 22 Juli 2014. Diakses 16 Oktober 2018

¹⁷ Mannheim, Karl & Kecskemeti, Paul (1955). Essay on Sociology and Social Psychology. Journal of Philosophy, 52 (17), 468-472



adalah visi-misi, program maupun kebijakan yang akan dilakukan oleh pasangan calon jika nantinya mereka kelak akan menjawab sebagai kepala dan wakil kepala daerah.

SIKAP DAN KEYAKINAN TERHADAP MUATAN MEDIA SOSIAL

Sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian di antara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Pemilukada Jawa Barat menarik diteliti karena Gubernur petahana dianggap sebagai salah satu kepala daerah yang paling berhasil di Indonesia. Gambaran prestasi gemilang petahanan selalu dijadikan barometer bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah pada tahun 2018.

Pasangan calon yang ditampilkan pun berasal dari kalangan beragam profesi dan latar belakang yang berbeda. Namun, hampir semuanya dapat dikategorikan sebagai para kader terbaik bangsa yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi dan kemajuan bersama. Beragam sikap ditampilkan oleh informan dalam penelitian ini. Mayoritas informan melihat bahwa konten media social terkait dengan kampanye Pemilukada melihat bahwa tidak semua konten yang ditampilkan tersebut bermakna positif sehingga tidak layak untuk diteruskan kepada teman atau khalayak.¹⁸ Oleh karenanya diperlukan proses penyaringan dan pencermatan terhadap konten-konten tersebut. Para generasi milenial dalam menyikapi konten media sosial yang ada melihat bahwa tema-tema kampanye banyak yang memuat hal positif yang dapat diambil dari konten media sosial yang ditampilkan.¹⁹ Pemuatan profil para pasangan calon beserta kinerjanya selama ini memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat umum tentang layak tidaknya seorang calon untuk dipilih menjadi kepala daerah. Tema seperti ini penting bagi pemilih pemula yang belum banyak mengetahui latar belakang dan kinerja pasangan calon sebelumnya. Pada konten seperti ini, beberapa informan menyampaikan bahwa tidak jarang mereka lakukan feedback dengan memberikan tanggapan like atau turut membagikan konten seperti pada facebook atau whatsapp mereka.²⁰ Pada bahagian lainnya, informan yang menjadi relawan pasangan calon turut juga melakukan modifikasi atas konten seperti ini seperti memperbaiki tampilan gambar sehingga lebih baik dilihat oleh para follower atau teman-teman para relawan.

¹⁸ Marijan, Kacun (1999). "The Study of Political Culture in Indonesia". Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, XII (2), 57-66.

¹⁹ Mas'ood, Mochtar & MacAndreas, Colin (2000). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

²⁰ McQuail, D. (1987). Mass Communication Theory: An Introduction (3'd ed.). Edisi Bahasa Indonesia, Teori Komunikasi Massa. Alih bahasa, Agus Dharma dan Aminuddin Ram, Jakarta: Erlangga.



KESIMPULAN

Budaya politik adalah corak perilaku dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa, pemerintahan nasional, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat dan norma, dan merupakan budaya yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat setiap hari. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai sistem nilai bersama sosial, yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan perumusan kebijakan publik dari seluruh masyarakat. Media sosial merupakan saluran komunikasi para aktor politik untuk berkomunikasi dengan pendukung dan pemilih. Bentuk komunikasinya adalah membangun opini publik sekaligus menggalang banyak dukungan politik. Penggunaan media sosial juga meningkatkan jaringan komunikasi politik, hubungan politik, dan partisipasi publik dalam pemilu.

Perhelatan Pemilukada Jawa Barat telah diselenggarakan dan menempatkan pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode 2018-2023. Kemenangan tersebut didasari oleh banyak faktor dan salah satunya tidak terlepas dari peranan komunikasi politik melalui pemanfaatan media sosial. Pasangan lain juga memperoleh keuntungan elektoral dalam pemanfaatan media sosial ini dengan pengambilan tema yang tepat dalam konteks politik nasional kontemporer. Perolehan suara signifikan pasangan Sudrajat dan Syaikh dengan elektabilitas rendah pada awal tahapan kontestasi terbukti mampu menempati peringkat kedua pada perhitungan suara akhir. Hal ini mengkonfirmasi pendapat D. McQuail tentang pentingnya media massa termasuk didalamnya media social sebagai instrumen utama dalam komunikasi politik. Intensnya penggunaan media sosial di kalangan generasi milineal pada sisi yang lain sejalan dengan tipe budaya politik mereka dan budaya politik masyarakat Indonesia secara umum. Generasi milineal dengan karakteristik budaya politik yang dominan apatis atau parochial ternyata tidak serta merta sejalan dengan pola perilaku politik mereka dalam kontestasi pemilu ini. Generasi milineal dengan penggunaan media sosial yang intens cenderung berpartisipasi secara politik dengan memanfaatkan media sosial menjadi katalisator untuk berpartisipasi dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sahida, *Sekali lagi tentang hoax*, (Yogyakarta:Majalah Tempo,2015), hal, 62.
- Bakti, Iriana, Evie Novianti dan H.R.Budiana, “*PERAN JEJARING KOUNIKASI DALAM MEMBANGUN KOHESIVITAS KELOMPOK*”, Jurnal IZUMI, Vol.1 No.3, (2015).



- Eko Harry, “*MEDIA SOSIAL PENDUKUNG JARINGAN KOMUNIKASI POLITIK*”, Jurnal ASPIKOM, Vol.3 No. 3,(2017).
- Budi Irawan, *Dasar-dasar administrasi publik*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), hal,34.
- Smith, D. Ronald, *Strategic Planning For Public Relations. Second Edition. Lawrence Erlbaum Associates Publisher. London (2015)*
- Soleh Sumirat, *Dasar-dasar public Relation*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2012).
- Almond, Gabriel A. & Verba, Sidney (1984). *Budaya Politik: Tingkahlaku Politik dan Demokrasi di Lima Negara (terjemahan)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ardial (2010). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks
- BPS (Badan Pusat Statistika) (2017). *Jawa Barat dalam Angka*, Bandung: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat.
- Cangara, Hafied (2016). *Komunikasi Politik, Teori dan Strategi*, Depok: Rajawali Press.
- Cohen, Michael (2016). “Top Political Hashtags of 2016” Berita 19 September 2016. Diakses 7 Oktober 2018
- Fadil, Muhammad (2007). *Konflik Daerah sebagai Budaya Politik Masyarakat*. Jurnal Madani, II (2007), 21-27.
- Gatara, Said AA & Said, Moh. Dzulkiah (2007). *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Gazali, Effendi (2004). *Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu, 8 (I) Volume 8, 53 –74.
- Kantaprawira, Rusadi (1985). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Kompas (2014) “Ini Hasil Rekapitulasi Pemilu Presiden di 33 Propinsi” Berita 22 Juli 2014. Diakses 16 Oktober 2018
- Mannheim, Karl & Kecskemeti, Paul (1955). *Essay on Sociology and Social Psychology*. Journal of Philosophy, 52 (17), 468-472
- Marijan, Kacun (1999). “The Study of Political Culture in Indonesia”. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, XII (2), 57-66.
- Mas’oed, Mochtar & MacAndreas, Colin (2000). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.



McQuail, D. (1987). *Mass Communication Theory: An Introduction* (3'd ed.). Edisi Bahasa Indonesia, *Teori Komunikasi Massa*. Alih bahasa, Agus Dharma dan Aminuddin Ram, Jakarta: Erlangga.

